

**NASKAH AKADEMIK
KLASIFIKASI DAN PEMERINGKATAN
PERGURUAN TINGGI INDONESIA
TAHUN 2015**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

Gedung D Kompleks Kemdikbud Lantai 6,
Jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta - 10270
Tel. (021) 57946063 - Fax. (021) 57946062

Daftar Isi

Pendahuluan	1
Latar Belakang	1
Tujuan	2
Dasar Hukum dan Urgensi	3
Data Perguruan dan Pendidikan Tinggi	3
Pengelolaan dalam rangka kesehatan organisasi	6
Karakteristik Data PD DIKTI	7
Keberadaan Perguruan Tinggi dan Program Studi	7
Jumlah Mahasiswa	9
Ketersediaan Dosen	12
Dosen berdasarkan jenjang pendidikan terakhir	14
Bidang keahlian dosen	15
Data terkait Proses Pendidikan	16
Data Penelitian dan Hasilnya	17
Skenario Pemanfaatan Data	19
Jenis Data yang dapat Diekstrak	19
Perumusan Indikator	211
Pemberian Angka dan Bobot Terhadap Indikator	222
Hasil Tahun 2015	23
Penutup	24
Acuan	25

Pendahuluan

Latar Belakang

Sebagaimana termaktub di dalam UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi (PT) adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. Berdasarkan penyelenggaranya dikenal Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN, yaitu Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah, dan Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS, yaitu Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat. Siapapun pengelolanya kewajiban Perguruan Tinggi adalah melaksanakan Tri-Dharma menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Lingkup yang termasuk dalam pendidikan tinggi adalah program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Berbeda dari pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi memiliki fungsi yang lebih beragam yaitu : a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; b. mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan c. mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora. Jika fungsi tersebut dijalankan dengan optimal maka akan dapat

dicapai tujuan pendidikan tinggi yaitu : a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mengingat strategisnya posisi perguruan tinggi maka mempunyai peran dan fungsi strategis dalam mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pelaku utama dalam proses transformasi di atas adalah tenaga pendidik atau dosen.

Tujuan

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan umum penulisan naskah ini adalah membangun landasan yang kokoh dalam melakukan klasifikasi dan pemeringkatan perguruan tinggi dalam kerangka perbaikan terus menerus dan kesehatan organisasi dalam melaksanakan tri-dharma. Secara khusus tujuan umum ini dijabarkan dalam beberapa tujuan khusus berikut ini.

- Merumuskan beberapa penciri kualitas perguruan tinggi yang telah terdokumentasi di berbagai pangkalan data yang ada sebagaimana amanat pasal 56 UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Melakukan telaah klasifikasi dan pemeringkatan berdasarkan berbagai penciri di atas dalam rangka perbaikan berkelanjutan baik untuk Perguruan Tinggi maupun Pendidikan Tinggi.
- Menyediakan landasan untuk mendukung keputusan eksekutif dalam mempromosikan kesehatan organisasi dan peningkatan kualitas terus menerus dari perguruan tinggi.

Dasar Hukum dan Urgensi

Dasar hukum dan urgensi untuk menelaah, mengklasifikasi dan memeringkatkan perguruan tinggi dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu aspek kesehatan organisasi baik perguruan tinggi dan pendidikan tinggi serta aspek kelengkapan data pada kedua tataran tersebut.

Data Perguruan dan Pendidikan Tinggi

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 mengamanatkan kelengkapan data perguruan dan Pendidikan Tinggi dalam istilah Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau sering disingkat PD DIKTI yang diatur dalam pasal 56 yang mengandung beberapa pengertian berikut:

- Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- Pangkalan Data Pendidikan Tinggi berfungsi sebagai sumber informasi bagi: a. lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; b. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan c. Masyarakat, untuk mengetahui kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dikembangkan dan dikelola oleh Kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian.
- Penyelenggara Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya.

Terlihat dari uraian di atas, PD DIKTI merupakan amanat undang-undang yang harus dibangun, dipelihara dan dipergunakan untuk perbaikan berkelanjutan baik bagi perguruan tinggi maupun pendidikan tinggi secara keseluruhan. Upaya perbaikan berkelanjutan ini harus selalu diletakkan dalam peningkatan kualitas pengelolaan baik perguruan maupun pendidikan tinggi. Dengan perkataan lain pendayagunaan PD DIKTI dilakukan untuk peningkatan kesehatan organisasi sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan dengan lebih efektif dan

efisien. Pemerintah harus meramu kegiatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan outcomes dan impact tersebut di atas.

Bagi pemerintah hal ini merupakan perwujudan dari tanggung jawab pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7 UU Pendidikan Tinggi yang mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi. Secara spesifik Tugas dan Wewenang ini dirinci dalam butir-butir berikut ini:

- kebijakan umum dalam pengembangan dan koordinasi Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Tinggi;
- penetapan kebijakan umum nasional dan penyusunan rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan tahunan Pendidikan Tinggi yang berkelanjutan;
- peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan;
- pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya Perguruan Tinggi;
- pemberian dan pencabutan izin yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perguruan Tinggi kecuali pendidikan tinggi keagamaan;
- kebijakan umum dalam penghimpunan dan pendayagunaan seluruh potensi masyarakat untuk mengembangkan Pendidikan Tinggi;
- pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium yang melibatkan Masyarakat untuk merumuskan kebijakan pengembangan Pendidikan Tinggi;
- pelaksanaan tugas lain untuk menjamin pengembangan dan pencapaian tujuan Pendidikan Tinggi.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut di atas, dikawal oleh prinsip-prinsip sebagaimana diamanatkan oleh pasal 6 berikut ini:

- pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika;
- demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;
- pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika;

- pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;
- keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas Mahasiswa dalam pembelajaran;
- pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;
- kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan Mahasiswa;
- satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- keberpihakan pada kelompok Masyarakat kurang mampu secara ekonomi;
- pemberdayaan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan Tinggi.

Terlihat dari penjabaran di atas upaya melakukan klasifikasi dan pemeringkatan perguruan tinggi sangatlah selaras dengan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penunaian tanggung jawab pemerintah.

Pengelolaan dalam rangka kesehatan organisasi

Sebagaimana disebutkan dimuka pendayagunaan data yang ada di PD DIKTI baik oleh lembaga akreditasi, pemerintah maupun masyarakat harus selalu diletakkan dalam kerangka pencapaian target dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini diharapkan bermuara dalam pengelolaan perguruan tinggi yang optimal sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 62 Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Prinsip dasar pengelolaan perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

- Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.
- Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi.
- Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi diatur dalam Peraturan Menteri.

Selanjutnya pasal 63 menggariskan bahwa pelaksanaan otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. akuntabilitas; b. transparansi; c. nirlaba; d. penjaminan mutu; dan e. efektivitas dan efisiensi.

Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sendiri meliputi bidang akademik dan bidang non-akademik. Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Sedangkan otonomi pengelolaan di bidang non-akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan yang mencakup a. organisasi; b. keuangan; c. kemahasiswaan; d. ketenagaan; dan f. sarana prasarana.

Selanjutnya ditegaskan pada Pasal 65 bahwa penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu. Sedangkan penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi pada PTS diatur oleh badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terlihat dari uraian di atas, kegiatan untuk mengklasifikasi dan memeringkat perguruan tinggi tidak bertentangan dengan pelaksanaan otonomi dan ini justru untuk memperkuat fondasi agar semua perguruan tinggi untuk selalu menjadi lebih baik di periode-periode berikutnya. Lebih jauh lagi hal ini dapat memperkuat akuntabilitas perguruan tinggi yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Perguruan Tinggi kepada Masyarakat baik yang berbentuk akuntabilitas akademik maupun akuntabilitas non-akademik.

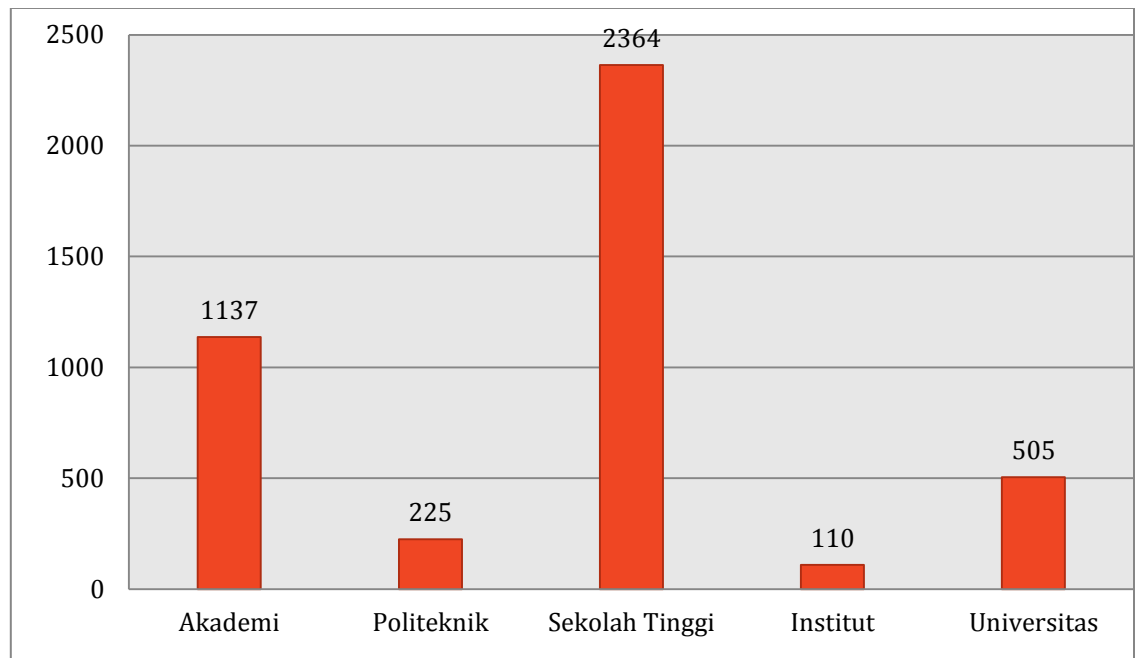
Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik pengertian bahwa kegiatan klasifikasi dan pemeringkatan perguruan tinggi merupakan penjabaran dari berbagai ketentuan pendidikan tinggi sepanjang dilaksanakan berdasarkan data-data yang dimiliki oleh perguruan tinggi dan tersimpan di PD DIKTI.

Karakteristik Data PD DIKTI

Sesuai dengan karakternya sebagai kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional dan dasar dalam pelaksanaan penjaminan mutu, kegiatan klasifikasi dan pemeringkatan harus dapat mendalami karakteristik data PD DIKTI yang ada pada saat ini dan merumuskan jalan pengembangannya di masa mendatang. Beberapa karakteristik yang seyogyanya didalami adalah data keberadaan perguruan tinggi saat ini, keberadaan program studi, dosen, mahasiswa, proses pendidikan, proses penelitian dan pengabdian masyarakat serta hasil-hasilnya.

Keberadaan Perguruan Tinggi dan Program Studi

Jumlah dan sebaran perguruan tinggi berdasarkan jenisnya disajikan pada tabel berikut ini.

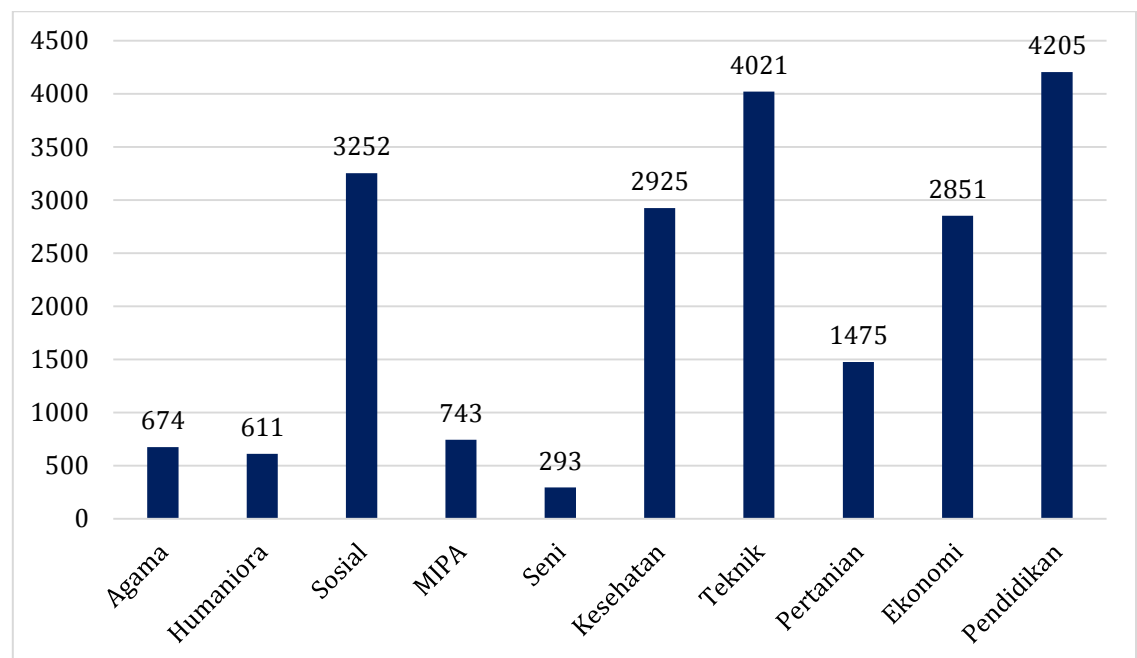


Tabel 1. Sebaran jumlah dan jenis perguruan tinggi berdasarkan data yang diunduh dari <http://forlap.dikti.go.id/> pada tanggal 28 Desember 2014.

Terlihat dari gambar di atas secara keseluruhan terdapat 4.341 perguruan tinggi yang tercatat di PD DIKTI. Selain di bawah Kementerian Ristek-Dikti, terdapat pula perguruan tinggi di bawah koordinasi Kementerian Agama, Badan

Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Badan Pertahanan Nasional, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pusat Statistik, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Informasi dan Komunikasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Lembaga Sandi Negara RI, Kementerian Pertahanan, Kepolisian, dan Lembaga Administrasi Negara. Sesuai dengan amanat UU Pendidikan Tinggi semua perguruan tinggi dari semua Kementerian/LPNK tersebut di atas harus melaporkan datanya ke PD DIKTI.

Salah satu faktor penting untuk melakukan identifikasi keberadaan perguruan tinggi adalah keberadaan program studi. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Sebaran program studi saat ini berdasarkan pengelompokan bidang studi disajikan pada tabel berikut ini:



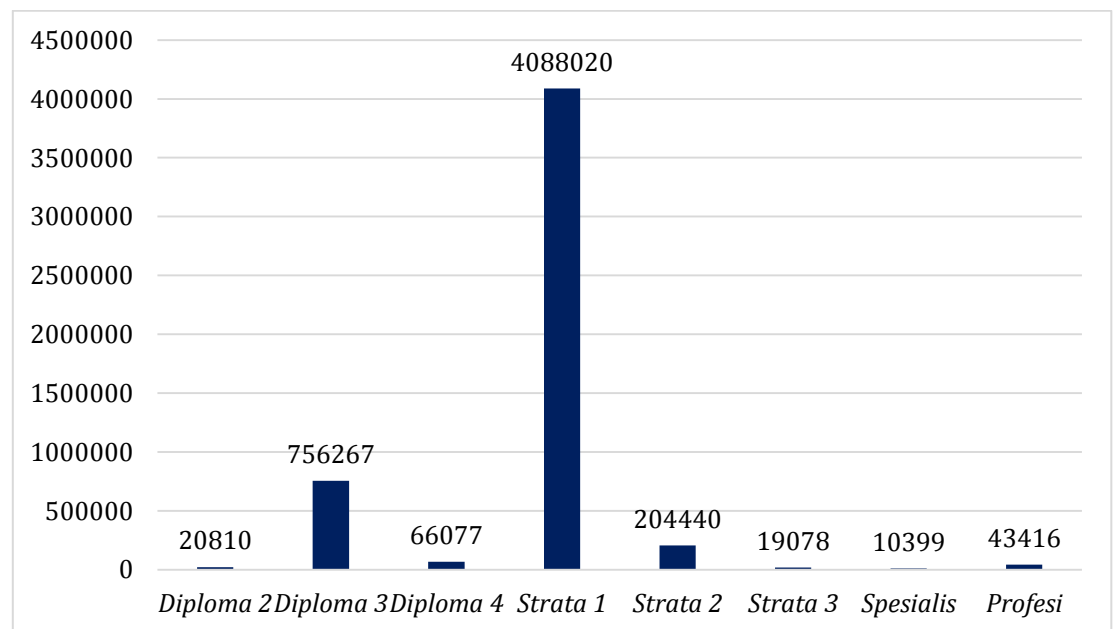
Tabel 2. Sebaran program studi saat ini berdasarkan data yang diunduh dari <http://forlap.dikti.go.id/perguruantinggi/homegraphprodi> pada tanggal 9 Desember 2014.

Jika program studi yang yang tercantum pada grafik di atas dijumlahkan maka akan didapatkan angka 21.050 program studi. Sesuai dengan definisi program studi tersebut di atas, di program-program studi inilah peserta didik terdaftar sebagai mahasiswa.

Jumlah Mahasiswa

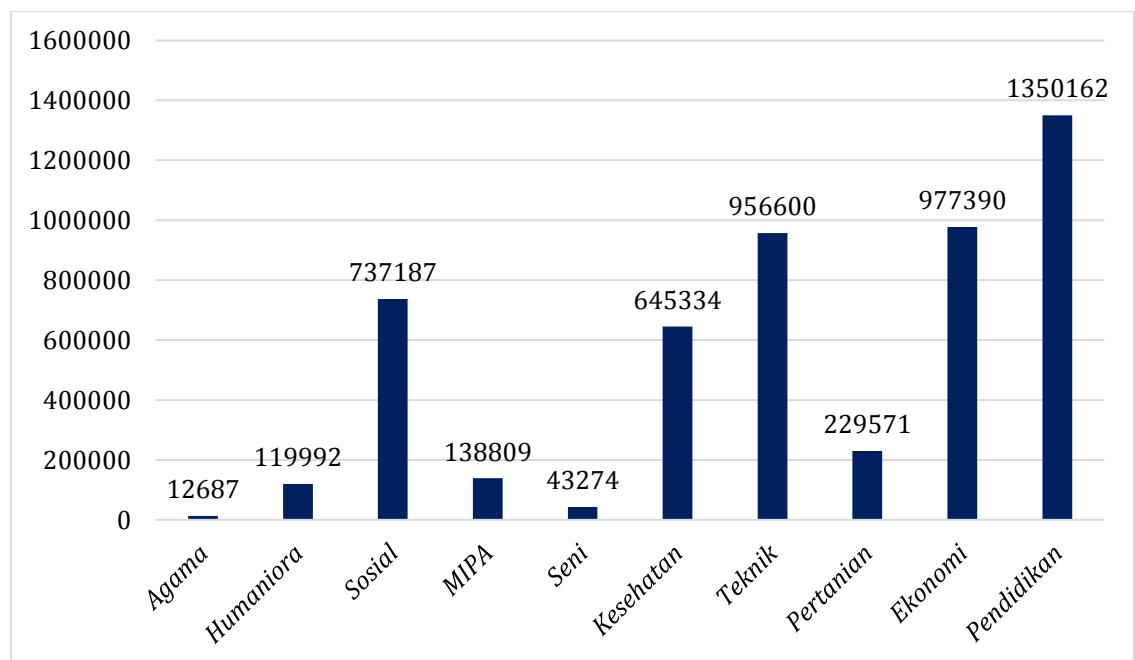
Banyaknya mahasiswa peserta didik tentu saja akan berkorelasi langsung dengan jumlah tenaga pendidik yang dibutuhkan. Sebagaimana telah dijelaskan di muka, jenis dan jenjang dalam pendidikan tinggi meliputi program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis. Pasal 46 ayat 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan dengan jelas bahwa dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimum: (a) lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan (b) lulusan program doktor untuk program pascasarjana. Hal ini membawa konsekuensi bahwa seluruh dosen dan calon dosen harus memiliki kualifikasi minimal tingkat magister.

Jumlah mahasiswa pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan tinggi saat ini berdasarkan data yang diunduh dari <http://forlap.dikti.go.id/i> pada tanggal 9 Desember 2014 disajikan pada tabel berikut ini:



Tabel 3. Jumlah mahasiswa pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan

Perlu ditekankan disini, bahwa jumlah mahasiswa di atas adalah posisi pada tanggal 9 Desember 2014. Hal ini berhubungan dengan mekanisme pemutakhiran data di PD DIKTI yang biasanya dilakukan 6 bulan sekali. Pendugaan kebutuhan tenaga pendidik berdasarkan jumlah mahasiswa pada umumnya dihitung berdasarkan rasio ideal dosen terhadap mahasiswa. Angka yang umum digunakan adalah 1 berbanding 20 untuk bidang-bidang ilmu kealaman dan 1 berbanding 30 untuk ilmu-ilmu sosial. Sebaran jumlah mahasiswa menurut kelompok bidang studi disajikan pada tabel berikut ini:



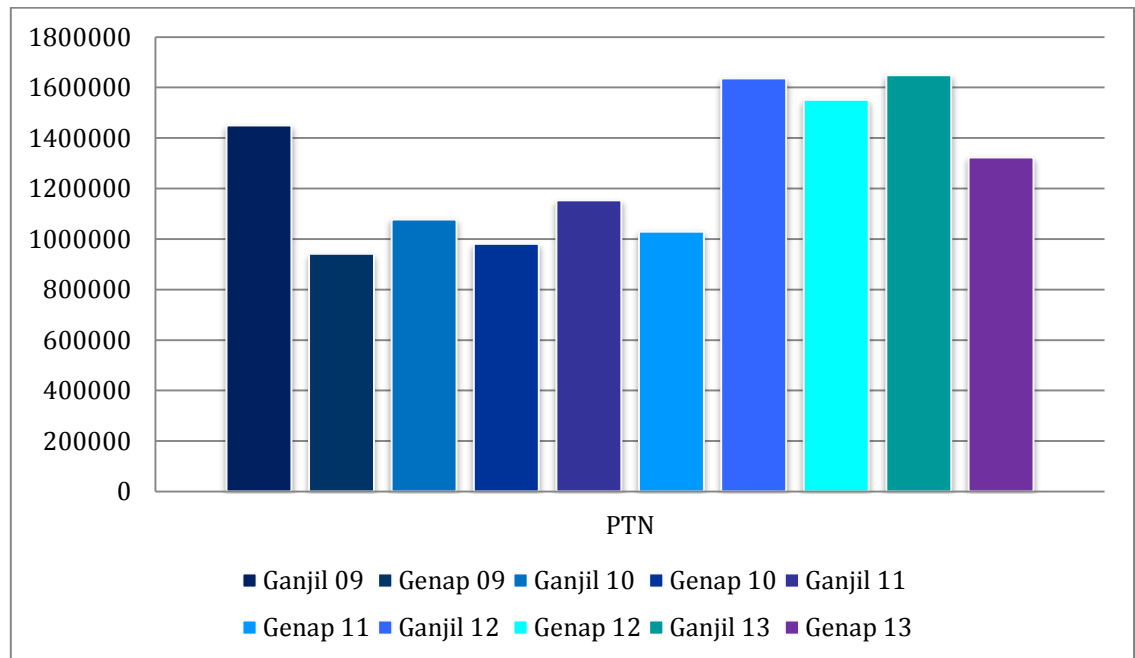
Tabel 4. Sebaran jumlah mahasiswa berdasarkan kelompok bidang studi

Terlihat dari gambar di atas, dominasi dari 5 bidang studi dominan yaitu Pendidikan, Ekonomi, Teknik, Sosial dan Kesehatan. Sebaran bidang studi ini sangat penting untuk dianalisis mendalam agar lulusan dapat berkontribusi secara cepat dalam pembangunan Indonesia. Apakah komposisi program studi yang ada saat ini merupakan komposisi yang ideal untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh Indonesia, merupakan pertanyaan yang harus dijawab dalam kajian-kajian yang akan datang.

Pergerakan jumlah mahasiswa yang ada tentu saja merupakan buah dari kondisi demografi suatu negara. Oleh karena itu, jika kita ingin melakukan pendugaan

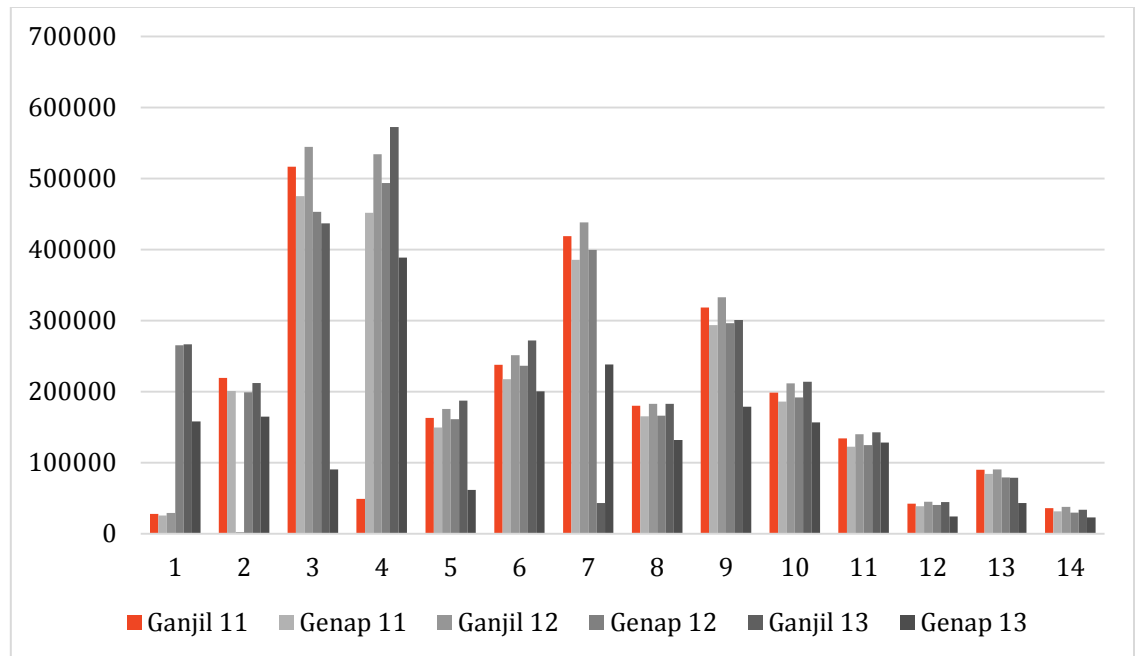
jumlah mahasiswa maka kita harus memahami karakteristik demografi Indonesia terutama dalam kurun waktu hingga tahun 2030.

Perkembangan jumlah mahasiswa di seluruh PTN berdasarkan data yang dilaporkan ke PD DIKTI sejak semester ganjil tahun 2009 hingga tahun 2013 semester genap disajikan pada tabel berikut:



Tabel 5. Perkembangan jumlah mahasiswa PTN berdasarkan data yang dilaporkan ke PD DIKTI sejak semester ganjil 2009 hingga semester genap 2013.

Terlihat dari tabel di atas jumlah mahasiswa yang dilaporkan pada semester ganjil relatif lebih tinggi dibandingkan dengan semester genap. Hal ini berkenaan dengan lama studi mahasiswa yang pada umumnya masih lebih dari 4 tahun untuk S1, 2 tahun untuk S2 dan 3 tahun untuk S3. Tabel di atas juga memperlihatkan bahwa jumlah mahasiswa relatif tetap. Hal ini mengindikasikan bahwa daya tampung PTN relatif sudah berada pada tingkat maksimal. Untuk PTS perkembangan jumlah mahasiswa yang diagregatkan pada tingkat Kopertis disajikan pada tabel berikut:



Tabel 6. Perkembangan jumlah mahasiswa PTS dijumlahkan pada tingkat Kopertis 1 – 14 berdasarkan data yang dilaporkan ke PD DIKTI sejak semester ganjil 2011 hingga semester genap 2013.

Terlihat dari gambar di atas sebagaimana di PTN, jumlah mahasiswa yang dilaporkan pada semester ganjil relative lebih tinggi dibandingkan dengan semester genap. Hal ini berkenaan dengan lama studi mahasiswa yang pada umumnya masih lebih dari 4 tahun untuk S1, 2 tahun untuk S2 dan 3 tahun untuk S3. Tabel di atas juga memperlihatkan bahwa jumlah mahasiswa relatif tetap. Hal ini mengindikasikan bahwa daya tampung PTS pun relatif sudah berada pada tingkat maksimal.

Ketersediaan Dosen

Sebagaimana telah dikemukakan di muka dosen sebagai tenaga pendidik memiliki peran sentral dalam proses transformasi peserta didik. Hal ini terjadi melalui suatu proses pembelajaran yaitu suatu proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dosen dalam interaksi ini adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan

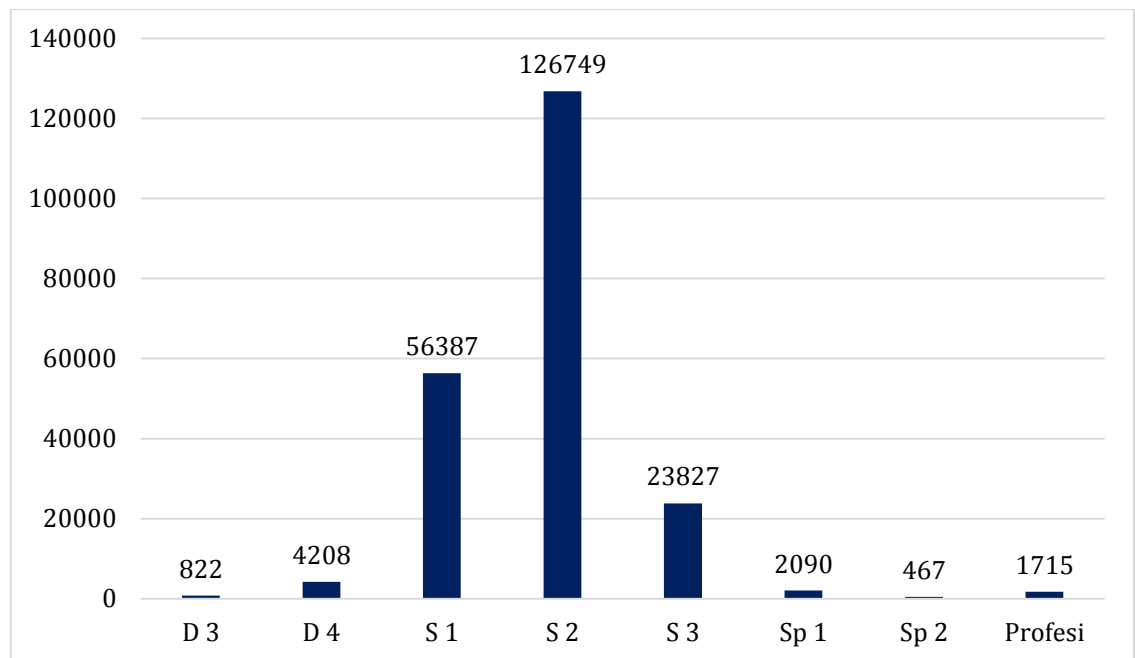
11	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4	24	6	0	0	0	0	0	0	0	34
12	Kementerian Kelautan dan Perikanan	15	143	18	9	0	0	0	0	0	0	185
13	Kementerian Kesehatan	131	3.26	559	271	5	0	0	20	3	6	4.255
14	Kementerian Keuangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kementerian Perhubungan	3	120	21	2	0	0	0	0	0	0	146
16	Kementerian Perindustrian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kementerian Pertanian	33	166	16	1	0	0	0	0	0	0	216
18	Kementerian Sosial	22	47	0	0	0	0	0	0	0	0	69
19	Lembaga Sandi Negara RI	0	12	0	1	0	0	0	0	0	0	13
20	Kementerian Pertahanan	16	64	26	0	0	0	0	0	0	0	106
21	Kepolisian	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	15
22	Lembaga Administrasi Negara	31	53	1	0	0	0	0	0	0	0	85
JUMLAH		23.024	116.928	37.857	2.863	455	4	0	1.792	420	1.167	184.506

Tabel 7. Sebaran dosen tetap di PT di lingkungan berbagai Kementerian

Terlihat dari tabel di atas, bagian terbesar dosen berada di bawah naungan Kementerian Ristek-Dikti baik yang mengajar di PTN maupun PTS. Lebih dari 90 % dosen yang ada di Indonesia saat ini berada dalam lingkup Kementerian Ristek-Dikti dan berada di berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Oleh karena itu perencanaan optimal pada tingkat Kementerian Ristek-Dikti akan memberikan dampak yang besar dan merupakan suatu keharusan.

Dosen berdasarkan jenjang pendidikan terakhir

Komposisi dosen berdasarkan jenjang pendidikan terakhir disajikan pada Tabel berikut ini:



Tabel 8. Sebaran dosen berdasarkan jenjang pendidikan terakhir, diunduh dari <http://forlap.dikti.go.id/dosen/homegraphjenjang> pada tanggal 13 Desember 2014

Terlihat dari gambar di atas masih rendahnya proporsi dosen berpendidikan S3 yaitu hanya 12.48%. Berdasarkan fakta ini perencanaan pengembangan tenaga pendidik di perguruan tinggi harus diarahkan pada dua arah yaitu pemenuhan jumlah yang dibutuhkan dan peningkatan kualifikasi dosen hingga taraf S3. Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terus berupaya untuk mendorong dan meningkatkan kuantitas dosen yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister melalui beragam pendekatan. Program peningkatan kualitas ini harus dijalankan secara sinambung sesuai dengan target pendidikan tinggi yang harus dinikmati oleh masyarakat serta dalam rangka mencapai target Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi yang telah ditetapkan.

Bidang keahlian dosen

Kelemahan yang masih harus ditangani dalam hal data ketersediaan adalah kecocokan antara keahlian dosen dengan program studi yang membutuhkan. Dalam hal ini terdapat perbedaan kedalaman antara data kebutuhan yang diwakili oleh data program studi dan mahasiswa yang didominasi oleh S1 dan D3 dengan data penyediaan yang pada umumnya sudah mengacu bidang keahlian spesifik

dari dosen berdasarkan bidang studi lanjutnya. Pangkalan data untuk dosen belum menyediakan kode untuk bidang keahlian spesifik yang dimiliki dosen. Selain itu data dosen yang dimasukkan oleh perguruan tinggi ke PD DIKTI belum melingkupi semua dosen yang mengajar/terlibat di program studi dan lebih banyak untuk memenuhi ketentuan 6 pengajar minimal per program studi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu jembatan yang menghubungkan data kebutuhan dan data penyediaan. Pada bagian tindak lanjut akan didiskusikan contoh penggunaan nomenklatur yang digagas oleh UNESCO.

Kodifikasi bidang keahlian ini penting untuk dirumuskan mengingat sentralnya peran dosen baik dalam bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Dalam bidang pendidikan dosen memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Dalam bidang penelitian dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya. Selain itu dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.

Data terkait Proses Pendidikan

Salah satu data terkait proses pendidikan yang perlu mendapat perhatian adalah lama studi mahasiswa. Hingga saat naskah akademik ini dibuat, PD DIKTI belum menyajikan rekap data lama studi di setiap perguruan tinggi. Mengingat data waktu mulai dicatatnya seseorang sebagai mahasiswa dan data waktu yang bersangkutan dinyatakan lulus, maka fasilitas perhitungan lama studi dapat dikembangkan dengan mudah.

Untuk setiap perguruan tinggi, data ini sebaiknya disajikan dalam bentuk rata-rata dari rasio terhadap waktu studi normal dari masing-masing program studi. Sebagai contoh jika seorang mahasiswa S1 menyelesaikan kuliahnya selama 4,5 tahun maka rasio penyelesaian studinya adalah $4,5/4$ atau 1,125. Rasio dari lama studi semua mahasiswa yang dilaporkan lulus di setiap periode ini lah yang dijadikan dasar untuk menghitung rata-rata rasio lama studi. Ini merupakan salah

satu contoh fitur yang harus dikembangkan oleh PD DIKTI di masa-masa mendatang.

Selain lama studi, data yang juga harus disiapkan pada tataran ini adalah data Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Untuk setiap perguruan tinggi, data ini sebaiknya disajikan dalam bentuk rata-rata dari rasio terhadap IPK maksimal yaitu 4. Sebagai contoh jika seorang mahasiswa S1 menyelesaikan kuliahnya dengan IPK 3,5 selama 4 tahun masa studi maka rasio IPKnya adalah $3,5/4$ atau 0,875. Rasio dari IPK semua mahasiswa yang dilaporkan lulus di setiap periode inilah yang dijadikan dasar untuk menghitung rata-rata rasio IPK perguruan tinggi. Ini merupakan salah satu contoh fitur yang harus dikembangkan oleh PD DIKTI di masa-masa mendatang.

Selain kedua data di atas, data-data lain yang perlu dikembangkan adalah prestasi kegiatan kemahasiswaan terutama prestasi di ajang PIMNAS dan lomba-lomba ilmiah kemahasiswaan.

Data Penelitian dan Hasilnya

Kinerja perguruan tinggi dalam melaksanakan penelitian dan pemanfaatan hasilnya dipantau secara regular oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan sebagaimana telah dijabarkan di dalam Panduan (Ditlitabmas, 2013). Penilaian kinerja penelitian dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasar indikator-indikator capaian yang ditetapkan. Penilaian kinerja penelitian tahun 2010 menghasilkan 4 (empat) kelompok perguruan tinggi (di luar politeknik), yaitu 10 PTN kelompok mandiri, 17 PTN dan 5 PTS kelompok utama, 15 PTN dan 44 PTS kelompok madya, dan sisanya PTN/PTS kelompok binaan. Kelompok politeknik terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu kelompok politeknik non-binaan dan kelompok politeknik binaan.

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga mengatur bahwa politeknik mempunyai kewenangan yang sama dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana perguruan tinggi yang lainnya. Dengan demikian politeknik berkewajiban melaksanakan penelitian sebagaimana perguruan tinggi yang lainnya, sehingga kinerja penelitian politeknik tidak perlu dikelompokkan secara khusus.

Pengelompokan ini mempunyai konsekuensi terhadap hak dan kewajiban perguruan tinggi dalam pengelolaan penelitian, termasuk hak untuk mendapatkan

alokasi dana penelitian sesuai dengan statusnya. Perguruan tinggi dengan kinerja penelitian yang sudah baik perlu terus didorong dengan dukungan pendanaan yang memadai, sedang perguruan tinggi yang masih memerlukan pembinaan, perlu dibantu peningkatan kinerja penelitiannya.

Setiap perguruan tinggi dapat mengalami jenjang naik atau turun, tergantung pada kinerja yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dalam periode sebelumnya. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi diharapkan selalu berupaya meningkatkan kinerjanya agar dapat masuk dalam kelompok di atasnya.

Empat aspek yang akan digunakan sebagai dasar penilaian kinerja penelitian perguruan tinggi, meliputi sumber daya penelitian, manajemen penelitian, luaran penelitian, dan luaran penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan. Data perguruan tinggi yang mencakup keempat aspek di atas selanjutnya akan dianalisis untuk menentukan posisi kelompok perguruan tinggi.

Selain memanfaatkan data yang ada di PD DIKTI, kinerja penelitian sebaiknya menggunakan juga data publikasi tingkat internasional yang pada umumnya terdokumentasi dengan sangat baik di pangkalan data scopus (www.scopus.com). Melalui pencarian dan penapisan yang komprehensif maka akan didapatkan kinerja publikasi dari setiap perguruan tinggi baik dipilah berdasarkan jenis dokumen, total, tahun penerbitan maupun pemilahan berdasarkan status penulis dan kategori ilmu dari berkala ilmiah tempat tulisan diterbitkan.

Skenario Pemanfaatan Data

Pada bab sebelumnya telah dibahas karakteristik data di PD DIKTI, maka kini saatnya untuk membangun skenario untuk memanfaatkan data PD DIKTI sebagai dasar untuk melakukan klasifikasi dan pemeringkatan perguruan tinggi. Perlu ditekankan disini bahwa klasifikasi dan pemeringkatan ini diletakkan dalam kerangka perbaikan berkelanjutan baik untuk data perguruan tinggi maupun pendidikan tinggi secara keseluruhan. Sesuai dengan tujuan penulisan naskah akademik ini, maka skenario pemanfaatan data untuk melakukan klasifikasi dan pemeringkatan perguruan tinggi dimulai dengan perumusan jenis data yang dapat diekstrak dari berbagai pangkalan data, perumusan indikator yang dapat diturunkan dari data, dan cara penilaian indikator serta bobotnya sebagai dasar perhitungan kriteria tunggal.

Jenis Data yang dapat Diekstrak

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, klasifikasi dan pemeringkatan perguruan tinggi memiliki prinsip perbaikan berkelanjutan. Hal ini juga membawa konsekuensi terhadap data yang akan digunakan. Secara umum terdapat enam kategori data yaitu:

1. Data yang langsung dapat digunakan yaitu data yang dimasukkan oleh perguruan tinggi ke PD DIKTI dan telah dilakukan rekap oleh PD DIKTI untuk tiap perguruan tinggi. Contoh untuk kategori ini adalah jumlah mahasiswa, jumlah dosen dan kategori dosen berdasarkan pendidikan dan jenjang kepangkatan terakhir.
2. Data yang telah dimasukkan oleh perguruan tinggi ke PD DIKTI dan belum dilakukan rekap oleh PD DIKTI untuk tiap perguruan tinggi. Contoh untuk kategori ini adalah data lama studi mengingat tanggal registrasi awal dan tanggal mahasiswa dinyatakan lulus telah tercatat, tetapi belum dilakukan penghitungan lama studi.
3. Data hasil penilaian yang telah tersedia, tetapi belum dicakup oleh PD DIKTI. Contoh kategori ini adalah penilaian kinerja penelitian perguruan tinggi yang dilakukan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, dan data prestasi kegiatan kemahasiswaan.

4. Data yang relatif telah tersedia pada tingkat perguruan tinggi, tetapi belum disediakan wadah di PD DIKTI. Contoh data kategori ini adalah data-data yang berkaitan dengan pendanaan proses pelaksanaan tri-dharma perguruan tinggi.
5. Data dari luar PD DIKTI yang relatif telah mapan dan siap digunakan. Contoh kategori ini adalah data hasil akreditasi oleh BAN dan data publikasi di pangkalan data Scopus.
6. Data dari luar PD DIKTI yang penting untuk menggambarkan mutu perguruan tinggi tetapi belum memiliki struktur pengelolaan. Contoh kategori ini adalah data keberadaan mahasiswa asing dengan berbagai variannya, data kerjasama dan publikasi internasional dengan berbagai ragam kualitasnya dan lain-lain. Data ini membutuhkan pembahasan mendalam sebelum digunakan sebagai dasar klasifikasi dan pemeringkatan.

Jenis data yang dapat dijadikan penciri dan dapat diekstrak dari berbagai pangkalan data yang telah dibahas sebelumnya serta langkah pengembangan yang dibutuhkan dirinci dalam tabel berikut ini:

No.	Jenis Data	Langkah Pengembangan
1.	Jumlah Mahasiswa	Berdasarkan hasil pemutakhiran oleh perguruan tinggi di 2 semester terakhir.
2.	Jumlah Dosen	Berdasarkan hasil pemutakhiran oleh perguruan tinggi di 2 semester terakhir, dapat dirinci berdasarkan pendidikan terakhir dan jenjang kepangkatan
3.	Lama Studi	Data tanggal masuk dan lulus tersedia, tetapi belum diolah dalam bentuk lama studi
4.	IPK	Data belum tersedia di PD DIKTI, masih harus disiapkan
5.	Kegiatan Kemahasiswaan	Data capaian PIMNAS telah tersedia, tetapi belum disediakan wadah di PD DIKTI. Perlu disediakan wadah untuk kegiatan lain (contoh: lomba internasional).
6.	Akreditasi	Akreditasi institusi dan program studi disediakan oleh BAN-PT, perlu dibuat tautan ke PD DIKTI
7.	Penelitian	Cara penilaian telah tersedia, tetapi belum disediakan wadah di PD DIKTI.
8.	Pendanaan	Data telah tercatat di perguruan tinggi tetapi belum terkait dengan PD DIKTI

9.	Publikasi Internasional	Menggunakan pangkalan data www.scopus.com , dapat dirinci berdasarkan jenis dokumen dan tahun publikasi
10.	Kerjasama Internasional	Mebutuhkan pembahasan mendalam dalam hal level dan kesetaraannya.

Tabel 9. Karakteristik data dari berbagai pangkalan data

Perumusan Indikator

Langkah berikutnya adalah merumuskan indikator berdasarkan data-data yang dapat diekstrak dari pangkalan data. Prinsip dasar yang digunakan adalah SMART (*Simple, Measurable, Accurate, Relevant, and Timely*). Beberapa indikator yang disarankan dan cara perhitungannya disajikan pada tabel berikut ini:

Aspek	Cara Perhitungan	Kode
Kualitas Dosen	Jumlah Dosen berpendidikan S3 / Jumlah Dosen Total	A1
	Jumlah Dosen dalam jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar / Jumlah Dosen Total	A2
Kecukupan Dosen	Jumlah Dosen Tetap / Jumlah Mahasiswa	B1
	Jumlah Dosen Tetap / Jumlah Dosen Total	B2
Kualitas Manajemen	Akreditasi Institusi	C1
	Jumlah PS terakreditasi A dan B / Jumlah PS Total	C2
	Jumlah dana dari SPP Mahasiswa / Jumlah Dana Masyarakat Total	C3
	Rata-rata rasio lama studi aktual terhadap lama studi menurut kurikulum pada satu periode pelaporan	C4
	Rata-rata rasio IPK aktual terhadap IPK maksimum pada satu periode pelaporan	C5
Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan	Jumlah capaian (emas, perak dan perunggu) pada PIMNAS	D1
	Prestasi pada lomba internasional	D2
Kualitas kegiatan Penelitian	Capaian kinerja penelitian sesuai kriteria DP2M	E1
	Jumlah dokumen terindeks scopus / dosen tetap	E2
	Jumlah artikel ilmiah terindeks scopus / dosen tetap	E3

Tabel 10. Indikator untuk Klasifikasi dan Pemeringkatan Perguruan Tinggi

Terlihat dari tabel di atas, berbagai data digunakan untuk merumuskan indikator dan beberapa di antaranya merupakan indikator agregat yang mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pemberian Angka dan Bobot Terhadap Indikator

Tahap berikutnya adalah pemberian angka (score) berdasarkan capaian terhadap indikator tersebut termasuk bobotnya terhadap nilai keseluruhan. Tahap ini merupakan tahap yang penting dan dapat dijadikan alat pengendali kebijakan. Dengan kata lain Kemristek-Dikti akan memiliki perangkat untuk mencapai visi dan misinya melalui penekanan terhadap indikator-indikator tertentu yang relevan dengan prioritas pengembangan Pendidikan Tinggi. Berikut adalah usulan pemberian angka dan bobot indicator dimaksud:

Kode	Cara Pemberian Angka	Bobot (%)
A1	>40 : 4; turun proporsional	6
A2	>40 : 4; turun proporsional	6
B1	17-33 : 4; > 33 dan < 17 : turun proporsional	9
B2	> 90 : 4; <50 : 0; diantaranya proporsional	9
C1	A: 4; B: 3; C:1; Tidak ada : 0	12
C2	Maksimal : 4; turun proporsional	18
C3	Minimal : 4; turun proporsional	--
C4	<=1 : 4; <= 1,25 : 3; ,= 1.5 : 2; <=1.75 : 1; yang lain 0	--
C5	>= 0.8 : 4; >= 0.7 : 3; >= 0.6 : 2; >= 0.5 : 1; yang lain 0	--
D1	Emas (5), Perak (3), Perunggu(1); Nilai maksimal: 4; turun proporsional	10
D2	Prestasi pada lomba internasional (perlu standarisasi)	--
E1	Angka capaian sesuai panduan DP2M	21
E2	Maksimal : 4; turun proporsional	3,6
E3	Maksimal : 4; turun proporsional	5,4

Tabel 11. Cara Pemberian Skor terhadap Indikator

Terlihat dari tabel di atas, indikator yang masih memerlukan pembahasan belum mendapatkan bobot untuk putaran pertama ini.

Hasil Klasifikasi dan Pemeringkatan Perguruan Tinggi Indonesia - 2015

Hasil tahun 2015 dengan menggunakan data per Desember 2014 disajikan pada tabel berikut ini.

Nomor	Kode PT	Nama PT	Jumlah Dosen Tetap	Rasio Mhs/Dosen	%Dosen Tetap	%S3	%(LK+GB)	Skor Rasio Mhs/Dosen	Skor %Dosen Tetap	Skor %S3	Skor %(LK+GB)	Kualitas SDM	%PS Akreditasi A	Akreditasi Institusi	Skor Akreditasi	Kualitas Manajemen	Medali Emas PIMNAS	Medali Perak PIMNAS	Medali Perunggu PIMNAS	Skor Kegiatan Kemahasiswaan	Kualitas Kegiatan Mahasiswa	Jumlah Dokumen Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Skor Publikasi	Skor Penelitian	Kualitas Penelitian & Publikasi	Skor Total	Peringkat
1	002001	Institut Teknologi Bandung	1148	18.45	98.97	64.98	39.11	4.00	4.00	4.00	3.91	3.98	74.3	4.00	3.4	3.4	0	1	0	3.0	0.1	42.997	18.990	4.0	339.3	4.0	3.422	1
2	001001	Universitas Gadjah Mada	2141	24.85	88.07	40.07	39.51	4.00	3.81	4.00	3.95	3.93	60.7	4.00	3.1	3.1	13	8	7	96.0	4.0	9.668	6.847	1.2	328.5	3.1	3.421	2
3	002003	Institut Pertanian Bogor	1151	19.25	85.96	65.42	46.57	4.00	3.60	4.00	4.00	3.88	65.3	4.00	3.2	3.2	6	5	2	47.0	2.0	14.440	11.399	2.0	290.8	3.0	3.208	3
4	002002	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	953	18.01	95.30	30.22	36.41	4.00	4.00	3.02	3.64	3.73	57.9	4.00	3.0	3.0	5	8	7	56.0	2.3	15.614	8.395	1.6	234.8	2.4	2.979	4
5	001002	Universitas Indonesia	2397	17.17	86.35	33.21	34.54	4.00	3.63	3.32	3.45	3.65	63.4	4.00	3.1	3.1	0	0	1	1.0	0.0	7.785	4.501	0.9	312.8	2.8	2.886	5
6	001019	Universitas Brawijaya	1751	25.19	93.69	29.64	33.18	4.00	4.00	2.96	3.32	3.66	48.0	4.00	2.8	2.8	6	5	6	51.0	2.1	5.494	4.352	0.8	262.0	2.4	2.851	6
7	001007	Universitas Padjadjaran	1891	17.70	90.65	28.61	33.21	4.00	4.00	2.86	3.32	3.64	52.5	4.00	2.9	2.9	0	2	0	6.0	0.3	3.871	2.813	0.5	311.9	2.7	2.791	7
8	001004	Universitas Airlangga	1594	17.28	87.97	26.98	38.71	4.00	3.80	2.70	3.87	3.65	41.6	4.00	2.6	2.6	4	6	2	40.0	1.7	3.965	3.551	0.6	256.3	2.3	2.730	8
9	001008	Universitas Diponegoro	1711	23.41	92.79	23.14	33.66	4.00	4.00	2.31	3.37	3.54	42.3	4.00	2.6	2.6	3	0	1	16.0	0.7	4.886	3.238	0.6	267.8	2.4	2.629	9
10	001005	Universitas Hasanuddin	1796	13.33	91.12	38.25	48.61	2.78	4.00	3.83	4.00	3.60	33.6	4.00	2.4	2.4	0	0	0	0.0	0.0	3.708	2.717	0.5	286.5	2.5	2.554	10

* Hasil lengkap dari perhitungan tahap pertama ini akan disampaikan dalam dokumen tersendiri yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Penutup

Kerangka berpikir dan penjelasan terkait penyusunan Klasifikasi dan Pemingkatan Perguruan Tinggi Indonesia yang disampaikan di dalam Naskah Akademik ini menunjukkan bahwa simulasi data yang digunakan dapat memberikan gambaran secara cepat terkait perkembangan kapasitas perguruan tinggi di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat data dan variabel yang harus dibahas, diperkuat, dan dilengkapi. Hal tersebut merupakan bagian dari rencana pengembangan yang harus dilakukan oleh Kemristek-Dikti di dalam penyelenggaraan Klasifikasi dan Pemingkatan Perguruan Tinggi di masa mendatang.

Sebagaimana terlihat dari perhitungan tahap pertama, dasar klasifikasi dan pemingkatan menggunakan data yang sudah tersedia di berbagai pangkalan data. Oleh karena itu pengembangan aplikasi komputer untuk pemingkatan yang dapat menghubungkan berbagai pangkalan data secara *real time* merupakan suatu keniscayaan. Menu khusus ini akan diintegrasikan di dalam Pusat Data Pendidikan Tinggi.

Acuan

DP2M. 2013. Panduan Penilaian Kinerja Penelitian Perguruan Tinggi.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

UNESCO. 1988. Proposed International Standard Nomenclature for Fields of Science and Technology. <http://www.unesco.org>